

**MANAJEMEN BENCANA BANJIR OLEH BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN KAMPAR**

Oleh : Galih Razuna Alghifari

Galihrazuna06@gmail.com

Pembimbing : Dr. Febri Yuliani, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63272

Abstract

Disaster management is an action taken at the time before, during, and after disasters. Kampar Regency is one of regencies in Riau Province experienced frequent flood events in some regions. In addition due to the overflow of rivers in Kampar regency result of the opening of the door power (hydropower) Long Koto Kampar, flooding in Kampar also be caused by heavy rains. The purpose of this study was to determine how the flood disaster management conducted by the Regional Disaster Management Agency (BPBD) Kampar and to determine the factors inhibiting the flood disaster management. The research is a qualitative research with descriptive approach. The collection of data is needed both primary data and secondary data were collected through interviews, observation and documentation and then analyzed so that it can be deduced from existing research problems. The results of this study found that implementation of disaster management conducted by the Regional Disaster Management Agency (BPBD) Kampar not implemented to the fullest, it is caused by several factors inhibiting the ability of human resources, people, budgets, and organizational structures that are not performing their duties and functions.

Keyword: *Disaster Management, Disaster Management Agency*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara rawan bencana, salah satu penyebabnya karena posisi geografis Indonesia yang di apit oleh dua samudra besar dunia (samudra Hindia dan samudra Pasifik) dan posisi geologis Indonesia pada pertemuan tiga lempeng utama dunia yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik yang sewaktu-waktu dapat menjadi bencana besar bagi Indonesia apabila lempeng-lempeng tersebut saling bertabrakan. Selain itu Indonesia memiliki berbagai potensi bencana seperti banjir, kebakaran hutan dan lahan, gempa, puting beliung, longsor, dan sebagainya.

Sebagai bentuk upaya penanggulangan bencana yang terjadi di Indonesia, maka dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang memiliki tugas dan fungsi yang secara sederhana BNPB sebagai pengarah penanggulangan bencana dan sebagai pelaksana penanggulangan bencana secara nasional. Selama melaksanakan penanggulangan bencana, BNPB dibantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang ada di setiap Provinsi dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tingkat kabupaten.

Provinsi Riau menjadi provinsi yang rawan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan, banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Potensi bencana yang paling tinggi di Provinsi Riau adalah bencana kebakaran hutan lahan dan bencana banjir, ini disebabkan tanah yang ada di Provinsi Riau sebahagian merupakan lahan gambut yang rawan apabila terbakar. Terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau didukung cuaca panas ditambah dengan faktor ulah manusia yang melakukan pembakaran hutan, penebangan, dan sebagainya. Selain kebakaran hutan dan lahan, potensi bencana banjir di Provinsi

Riau cukup tinggi karena letak geografis dan geologis yang tidak cukup efektif dalam menahan air yang diakibatkan dari hujan maupun luapan air sungai.

Banjir merupakan bencana yang terjadi hampir diseluruh Indonesia, selain memutuskan akses, banjir juga menyebabkan masyarakat mengalami kerugian harta dan benda serta merendam rumah masyarakat. Selain itu akibat dari bencana banjir biasanya juga menyebabkan bencana longsor karena tanah yang ada strukturnya menjadi lemah. Kemudian menurut BPBD Provinsi Riau apabila terjadi banjir selain menyebabkan longsor biasanya juga mendatangkan bencana puting beliung. Ketiga bencana tersebut merupakan bencana yang saling berkaitan dan memiliki runtutan kejadian. Oleh karena itu, BPBD Provinsi Riau mengklasifikasikan ketiga bencana tersebut di satu kelompok. Berikut kejadian bencana banjir, longsor dan puting beliung di Provinsi Riau tahun 2017-2019.

Tabel 1.1
Kejadian Bencana Banjir, Longsor dan
Puting Beliung di Provinsi Riau Tahun
2017-2019

	Banjir	Longsor	Puting Beliung
Tahun 2017	249	6	6
Tahun 2018	196	18	10
Tahun 2019	261	8	7
Jumlah	706	32	23

Sumber: BPBD Kabupaten Kampar, 2019

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dari kelompok bencana tersebut bencana yang sering terjadi dibandingkan dengan bencana lainnya di kelompok tersebut adalah bencana banjir. Tahun 2017 bencana banjir terbanyak terjadi di Kuantan Singingi dengan total 81 kejadian, Indragiri Hilir 71 kejadian, Kampar 60 kejadian, dan seterusnya. Tahun 2018 bencana banjir terbanyak terjadi di Kampar dengan total 46 kejadian, Rokan Hulu 37 kejadian, Bengkalis 27 kejadian, dan

seterusnya. Pada tahun 2019 bencana banjir terbanyak terjadi di Kuantan Singingi dengan total 92 kejadian, Kampar 71 kejadian, Rokan Hulu 63 kejadian, dan seterusnya.

Dapat dilihat bahwa kejadian bencana banjir yang paling sering terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Kampar, yang membedakan penyebab banjir di Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Kampar adalah banjir di Kabupaten Kuantan Singingi disebabkan oleh cuaca hujan deras yang terjadi namun di Kabupaten Kampar selain cuaca hujan deras yang terjadi, banjir juga dapat terjadi walaupun tidak memasuki musim penghujan. Hal tersebut disebabkan didaerah Kabupaten Kampar terdapat PLTA Koto Panjang yang merupakan arah hilir sungai dari Provinsi Sumatera Barat, oleh karena itu apabila Sumatera Barat mengalami hujan deras akan berpengaruh kepada Kabupaten Kampar. Apabila air di PLTA Koto Panjang sudah tidak mampu menahan volume air maka pintu air akan dibuka dan biasanya akan menyebabkan banjir karena air Sungai Kampar meluap.

Oleh karena itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan tugas dan fungsi pokok mengenai penanggulangan kebencanaan, sekaligus sebagai penanggung jawab utama dalam menanggulangi bencana-bencana yang ada di Kabupaten Kampar sesuai dengan peraturan yang ada maka BPBD Kabupaten Kampar harus menyelenggarakan penanggulangan bencana atau manajemen bencana pada wilayahnya. Manajemen Bencana bertujuan untuk mengurangi dampak kejadian bencana serta mengurangi kejadian bencana di suatu wilayah. Bencana memang tidak dapat dihindari, akan tetapi bencana dapat dikurangi dampaknya ataupun dapat dicegah dengan manajemen bencana yang baik.

BPBD Kabupaten Kampar telah melaksanakan manajemen bencana

khususnya bencana banjir karena bencana banjir menjadi salah satu bencana yang rutin terjadi di Kabupaten Kampar selain bencana kebakaran hutan dan lahan. Manajemen bencana banjir yang dilakukan BPBD Kabupaten Kampar setiap tahunnya memiliki inti yang sama dan kegiatan yang dilakukan pun sama karena kegiatan yang disusun oleh BPBD Kampar telah disesuaikan dengan keadaan dan kondisi Kabupaten Kampar.

Manajemen bencana banjir yang dilaksanakan BPBD Kabupaten Kampar saat sebelum terjadi bencana berupa kegiatan sosialisasi dan patroli. Sebelum terjadi bencana, BPBD Kabupaten Kampar melalui bidang pencegahan dan kesiapsiagaan melaksanakan sosialisasi dengan turun ke kecamatan dan desa yang wilayahnya sering terdampak bencana, sosialisasi yang dilakukan mengenai mitigasi bencana dan biasanya sosialisasi dilakukan 2 kali dalam 1 bulan. Selain itu BPBD Kabupaten Kampar turun langsung menyebarkan leaflet/pamflet mengenai kebencanaan kepada masyarakat sekitar kawasan terdapat potensi bencana banjir serta melakukan siar radio baik melalui radio komunikasi (ripiter) maupun radio pemerintah daerah Suara Kampar yang biasanya dilakukan hanya pada awal tahun yaitu bulan Januari, tidak hanya melalui radio akan tetapi juga melalui media sosial seperti website, facebook serta melalui aplikasi Easy Record Disaster (E-Red) yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Kampar. Selain itu sebelum bencana banjir terjadi, biasanya BPBD Kampar telah menghimbau kepada masyarakat melalui kecamatan ataupun ke desa-desa yang sering terdampak bencana agar masyarakat sudah siap jika terjadi bencana di wilayahnya.

Kegiatan manajemen bencana banjir yang telah dilaksanakan BPBD Kabupaten Kampar pada saat bencana terjadi berupa membangun posko terpadu, membangun tenda pengungsi, memberikan bantuan korban-korban bencana dan membuat dapur umum. Tenda yang didirikan oleh BPBD Kabupaten Kampar tergantung permintaan dari masyarakat sehingga tidak ada jumlah pasti dalam mendirikan tenda-

tenda tersebut. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan untuk tetap menjaga masyarakat korban bencana terhindar dari rasa traumatis, takut, dan sebagainya yang dikhawatirkan akan mempengaruhi psikologis mereka. Selain membantu masyarakat, pada saat bencana banjir BPBD Kabupaten Kampar juga membangun kembali akses darurat seperti jembatan kayu guna menghubungkan kembali akses jalan yang terputus karena terendam banjir.

Saat sesudah bencana BPBD Kabupaten Kampar melaksanakan kegiatan pendataan dan merekap jumlah fisik yang terdampak, dan bila ada anggaran yang disediakan oleh pemerintah setempat maka perbaikan kembali akan langsung dilaksanakan seperti pembangunan turap, jembatan, dan sebagainya. Anggaran dalam pelaksanaan manajemen bencana sama setiap tahunnya namun terkadang dapat mengalami pengurangan selama prosesnya karena prediksi penggunaan anggaran bencana terkadang tidak sesuai dengan keadaan yang ada. Anggaran yang dimiliki BPBD Kabupaten Kampar merupakan anggaran yang digunakan untuk membeli inventaris/peralatan agar dalam pelaksanaan manajemen bencana lebih efektif.

Manajemen bencana banjir pada saat sebelum, saat, dan sesudah terjadi bencana banjir intinya sama setiap tahunnya baik itu di tahun 2017, 2018 dan 2019. Manajemen bencana pada tahun 2017, 2018 dan 2019 tidak ada bedanya karena semua kejadian bencana apapun itu sulit ditanggulangi karena beberapa faktor seperti keadaan letak geografis dan topografi, anggaran, kurang tanggap pemerintah setempat dalam melaksanakan manajemen bencana, sumber daya manusia yang tidak sesuai kriteria atau kemampuan di BPBD Kabupaten Kampar, dan kesadaran masyarakat yang tidak mau berubah. Jika berbicara mengenai manajemen bencana, intinya pada tahun 2017, 2018 dan 2019 manajemen bencana yang dilaksanakan tetaplah sama.

Sebagai pelaksana, BPBD Kabupaten Kampar memiliki peran untuk memberikan perlindungan masyarakat melalui upaya penanggulangan dan pengurangan risiko bencana banjir baik pra bencana, saat bencana, maupun pasca bencana, pelaksanaan manajemen bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar tersebut dikoordinasikan dengan beberapa pihak, yang BPBD Kabupaten Kampar menjadi *leading sector* dan berkoordinasi dengan Badan Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, TNI, POLRI, Pemerintah Daerah dan pihak lain yang terkait dalam bidang pekerjaan teknis.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengetahui manajemen bencana banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar serta untuk mengetahui faktor-faktor penghambat manajemen bencana banjir oleh BPBD Kabupaten Kampar. Oleh sebab itu, sangat perlu dilakukan penelitian lebih jauh, sehingga dalam penelitian ini penulis memilih judul : “ **Manajemen Bencana Banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar** ” .

1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian diatas maka dapat penulis rumuskan masalah pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana manajemen bencana banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar ?
2. Apa saja faktor penghambat manajemen bencana banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui manajemen bencana banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat manajemen bencana banjir oleh Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Terutama bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar dalam menyikapi bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Kampar.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah referensi kepustakaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Program Studi Administrasi Publik, serta menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti berikutnya yang membahas permasalahan yang sama.

2. KONSEP TEORI

2.1 Manajemen

Nickels, McHugh dan McHugh dalam **Sule dan Saefullah (2005:6)** mengatakan manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya.

Weihrich dan Koontz dalam **Musfah (2015:2)** menulis bahwa manajemen adalah proses perencanaan dan pemeliharaan lingkungan di mana individu, bekerja bersama dalam kelompok, mencapai tujuan-tujuan terpilih secara efektif. Dari definisi ini, tergambar pentingnya penciptaan lingkungan yang kondusif selain perencanaan, sehingga seseorang bisa bekerja dalam kelompok tanpa merasa canggung, yang pada akhirnya akan mengefektifkan pencapaian tujuan.

Menurut **Torang (2013:165)** manajemen sangat penting bagi setiap aktivitas individu atau kelompok dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang

diinginkan. Manajemen berorientasi pada proses (*process oriented*) yang berarti bahwa manajemen membutuhkan sumber daya manusia, pengetahuan, dan keterampilan agar aktivitas menjadi lebih efektif atau dapat menghasilkan tindakan dalam mencapai kesuksesan. Oleh sebab itu, tidak akan ada organisasi yang akan sukses apabila tidak menggunakan manajemen yang baik.

2.2 Bencana

Definisi “bencana” berasal dari bahasa Inggris “*disaster*” yang berakar dari kata latin “*disastro*”. *Disaster* berasal dari gabungan kata *DIS* yang berarti “negatif” dan *ASTRO* yang berarti “bintang” (*star*). Posisi bintang diyakini dapat memengaruhi nasib manusia sehingga “*disastro*” berarti “nasib kemalangan” atau “tidak beruntung” (*unlucky*). Ada juga yang mengartikan “peristiwa jatuhnya bintang-bintang ke bumi” menurut **Soemarno** dalam **Adiyoso (2018:20)**.

Secara umum menurut **Adiyoso (2018:21)** bencana adalah suatu kejadian yang ditimbulkan baik oleh faktor alam maupun nonalam yang dapat mengakibatkan kehilangan nyawa manusia, kerugian atau kerusakan ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya (peradaban) pada wilayah tertentu.

Pendapat lain mengenai bencana diungkapkan oleh **Asian Disaster Reduction Centre** dalam **Adiyoso (2018:21)** bencana adalah suatu gangguan serius terhadap masyarakat yang menimbulkan kerugian secara meluas dan dirasakan masyarakat, berbagai material, dan lingkungan (alam) di mana dampak yang ditimbulkan melebihi kemampuan manusia untuk mengatasinya dengan sumber daya yang ada.

Menurut **Parker** dalam **Adiyoso (2018:21)** bencana ialah sebuah kejadian yang disebabkan oleh alam maupun ulah manusia dan tidak biasa terjadi yang termasuk imbas dari kesalahan teknologi yang memicu respon dari masyarakat, komunitas, individu, maupun lingkungan untuk memberikan antusiasme yang bersifat luas.

Kemudian **United Nations Development Programme** dalam **Adiyoso (2018:20)** memberikan definisi bencana, merupakan fenomena yang terjadi karena komponen-komponen ancaman dan kerentanan bekerjasama secara sistematis yang didorong oleh pemicu sehingga menyebabkan terjadinya resiko bencana pada komunitas.

2.3 Banjir

Menurut **Gunawan (2010: 377)** Banjir adalah fenomena alam biasa yang terjadi ketika badan sungai tidak mampu menampung air sehingga melimpas ke kanan kiri sungai.

Adiyoso (2018: 38) berpendapat banjir ialah limpasan air yang melebihi tinggi muka air normal sehingga melimpas dari palung sungai yang menyebabkan genangan pada lahan rendah di sisi sungai.

Sedangkan menurut **Schwab et.al (1981)** dalam **Mardikaningsih et.al (2017)** banjir adalah luapan atau genangan dari sungai atau badan air lainnya yang disebabkan oleh curah hujan yang berlebihan a. atau salju yang mencair atau dapat pula b. karena gelombang pasang yang membanjiri c. kebanyakan pada dataran banjir.

Kemudian **Suprpto (2011)** dalam **Mardikaningsih et.al (2017)** mengatakan potensi bencana banjir di Indonesia sangat besar dilihat dari topografi dataran rendah, cekungan dan sebagian besar wilayahnya adalah lautan. Curah hujan di daerah hulu dapat menyebabkan banjir di daerah hilir. Apalagi untuk daerah-daerah yang tinggi permukaan tanahnya lebih rendah atau hanya beberapa meter di atas permukaan laut.

Kodoatie dan Sjarief (2006) dalam **Rosyidie (2013)** menjelaskan faktor penyebab banjir antara lain perubahan guna lahan, pembuangan sampah, erosi dan sedimentasi, kawasan kumuh di sepanjang sungai, system pengendalian banjir yang tidak tepat, curah hujan tinggi, fisiografi sungai, kapasitas sungai yang tidak memadai,

pengaruh air pasang, penurunan tanah, bangunan air, kerusakan bangunan pengendali banjir. **Kodoatie dan Sjarief (2006)** juga memberikan beberapa contoh dampak atau kerugian banjir antara lain hilangnya nyawa atau terluka, hilangnya harta benda, kerusakan permukiman, kerusakan wilayah perdagangan, kerusakan wilayah industri, kerusakan areal pertanian, kerusakan system drainase dan irigasi, kerusakan jalan dan rel kereta api, kerusakan jalan raya, jembatan, dan bandara, kerusakan system telekomunikasi, dan lain-lain.

2.4 Manajemen Bencana

Menurut **Kusumasari (2014)** dalam **Wulansari et.al (2017)** manajemen bencana didefinisikan sebagai istilah kolektif yang mencakup semua aspek perencanaan untuk merespons bencana, termasuk kegiatan-kegiatan sebelum bencana dan setelah bencana yang mungkin juga merujuk pada manajemen risiko dan konsekuensi bencana.

Covello (1989) dalam **Adiyoso (2018:88)**, dalam pengelolaan risiko bencana memiliki proses sebagai berikut:

Penilaian risiko (*risk assesment*)

Pengelolaan risiko (*risk management*)

Komunikasi risiko sebagai bagian penting dari manajemen risiko bencana.

Kemudian **Susanto (2006)** dalam **Adiyoso (2018:96)** mengatakan manajemen bencana atau pengelolaan bencana adalah sebuah proses yang terus menerus dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk merencanakan dan mengurangi pengaruh bencana, mengambil tindakan segera setelah bencana terjadi, dan mengambil langkah-langkah untuk pemulihan.

Menurut **Sukma** dalam **Adiyoso (2018:93)** penyelenggaraan pengelolaan bencana atau manajemen bencana dibagi menjadi 3 tahapan yakni tahap prabencana, tahap saat tanggap darurat, dan tahap pascabencana. Tahap prabencana dibagi menjadi 2 situasi yakni; situasi tidak ada bencana dengan indikator perencanaan, pencegahan, pengurangan risiko, pendidikan, penelitian,

penataan tata ruang. Dan situasi terdapat potensi bencana dengan indikator mitigasi, peringatan dini, kesiapsiagaan. Kemudian pada tahapan saat tanggap darurat terdapat indikator berupa kajian cepat, status keadaan darurat, penyelamatan & evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, dan pemulihan. Kemudian pada tahapan pascabencana melibatkan tindakan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan indikator prasarana, sosial, ekonomi, kesehatan, kamtib, dan lingkungan.

Asian Disaster Preparedness Center (2003) dalam **Adiyoso (2018:88)** mengatakan manajemen bencana dapat diartikan sebagai organisasi yang efektif, panduan, pemanfaatan sumber daya untuk mencegah bencana. **Carter (2008: 19)** berpendapat manajemen bencana pada dasarnya adalah proses yang dinamis. Ini mencakup fungsi manajemen klasik perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, memimpin, dan mengendalikan. Ini juga melibatkan banyak organisasi yang harus bekerja bersama untuk mencegah, memitigasi, mempersiapkan, merespons, dan memulihkan dari dampak bencana. Manajemen bencana didefinisikan sebagai: Ilmu pengetahuan terapan yang berupaya, dengan pengamatan dan analisis bencana secara sistematis, untuk meningkatkan langkah-langkah yang berkaitan dengan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan.

Rijanta et.al (2018:38) mengatakan manajemen bencana (*disaster management*) memiliki beberapa fase yang terkadang memiliki terminologi berbeda di berbagai negara. Secara umum, manajemen bencana dapat dikelompokkan menjadi 4 tahapan, yaitu mitigasi (*mitigation*), kesiapsiagaan (*preparedness*), tanggap darurat (*response*), dan pemulihan (*recovery*).

Kemudian menurut **Ramli (2010: 31)** mengatakan manajemen bencana sendiri adalah suatu proses terencana yang dilakukan untuk mengelola bencana dengan baik dan aman melalui tiga tahapan, pertama ada tahap pra bencana yang terdiri dari kesiapsiagaan, mitigasi, dan peringatan dini, yang kedua ada saat bencana/ tanggap darurat, dan yang ketiga yaitu pascabencana yang terdiri dari rehabilitasi dan rekonstruksi.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, maksudnya mencatat secara teliti segala gejala (fenomena) yang dilihat dan didengar serta dibacanya (via wawancara atau bukan, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi atau memo, dokumen resmi atau bukan, dan lain-lain), dan peneliti harus membandingkan, mengkombinasikan, mengabstraksikan, dan menarik kesimpulan (**Bungin, 2008: 93**). Dengan menggunakan jenis deskriptif hasil penelitian ditujukan untuk mampu memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang ada terkait manajemen bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar dalam menangani bencana banjir di Kampar.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar di Jalan Langgini, Kota Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Alasan memilih lokasi penelitian di BPBD Kabupaten Kampar karena BPBD merupakan SKPD yang memiliki fungsi dan tugas pokok dalam penanggulangan bencana, dan juga karena BPBD Kabupaten Kampar merupakan penanggungjawab utama dalam melaksanakan penanggulangan bencana.

3.3 Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *purposive sampling* dengan informannya sebagai berikut :

1. Komandan Pusat Pengendalian Operasi BPBD Kabupaten Kampar
2. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Kampar
3. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Kampar
4. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Kampar
5. Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar
6. Kepala Sub Bagian Umum Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar
7. Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kampar
8. Masyarakat Kabupaten Kampar yang terdampak banjir.

3.4 Jenis Data

a. Data Primer

Menurut **Siyoto & Sodik (2015: 67)**, data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer ini didapatkan dengan cara observasi lapangan dan wawancara informan yang dalam hal ini mewawancarai pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar sebagai pelaksana utama dalam melaksanakan manajemen bencana, dan pihak-pihak lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan manajemen bencana banjir di Kabupaten Kampar.

b. Data Sekunder

Menurut **Siyoto & Sodik (2015: 68)**, data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, posisi peneliti sebagai tangan kedua. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian dan dapat menjadi penunjang

dalam penelitian ini, seperti:

1. Undang-Undang No.24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
2. Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Daerah Provinsi Riau No.17 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana Alam;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No.7 Tahun 2010 Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar
5. Rekapitulasi Kejadian Bencana Banjir, Longsor dan Puting Beliung di Provinsi Riau tahun 2017, 2018 dan 2019
6. Rekapitulasi Kejadian Bencana Banjir, Longsor dan Puting Beliung di Kabupaten Kampar tahun 2017, 2018 dan 2019
7. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022
8. Profil Kabupaten Kampar

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Peneliti ingin melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan manajemen bencana banjir yang dilakukan oleh BPBD Kampar pada saat sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana dan sesudah terjadinya bencana banjir di kabupaten Kampar.

Metode wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara semi-terstruktur, alasan menggunakan metode ini adalah agar dalam proses wawancara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi dari informan berjalan dengan sistematis dan informan pun dapat menyampaikan informasi mengenai manajemen bencana di Kabupaten Kampar lebih leluasa dan bebas dengan caranya sendiri tanpa harus dibatasi dengan daftar pertanyaan yang peneliti buat. Dengan metode ini peneliti memiliki daftar

pertanyaan wawancara akan tetapi tetap dibarengi dengan adanya pertanyaan bebas kepada informan dari pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar yang mengetahui manajemen bencana yang dilaksanakan di Kabupaten Kampar.

b. Observasi

Menurut **Idrus (2009: 101)** observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Metode ini digunakan untuk memperoleh data primer secara langsung dari responden yang dijadikan sampel penelitian. Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan dengan cara turun secara langsung ke lapangan/lokasi penelitian di Kabupaten Kampar untuk mengetahui atau mengamati seputar pelaksanaan manajemen bencana banjir saat tidak terjadi bencana, saat terjadi bencana, dan saat sesudah terjadi bencana banjir yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar. Kemudian data yang didapat dari hasil observasi tersebut selanjutnya dianalisis.

c. Dokumentasi

Pelaksanaan metode dokumentasi dengan mengumpulkan data dan informasi melalui benda-benda seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan, catatan, dan sebagainya yang dalam penelitian ini seperti: Dokumen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar, hasil wawancara dengan pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar, dan sebagainya.

3.6 Analisis Data

Analisis data dilakukan ketika data dari informan ataupun sumber lainnya telah didapatkan. Dalam membahas tentang analisis data, **Huberman dan Miles** dalam **Idrus (2009: 147-148)** mengajukan model analisis data yang disebutnya sebagai model

interaktif. Model ini terdiri dari tiga hal utama, yaitu (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi.

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini tahapan reduksi data merupakan bagian kegiatan analisis sehingga pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian tersebut, cerita-cerita yang berkembang, merupakan pilihan-pilihan analitis. Data atau informasi yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang sesuai dengan fenomena yang terjadi kemudian dirangkum dan dikategorikan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang terjadi di lokasi penelitian mengenai manajemen bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar dalam menangani bencana banjir untuk mencapai tujuan akhir penelitian.

Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah penyajian data. Penyajian data menurut **Miles dan Huberman** dalam **Idrus (2009: 151)** sebagai informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di lokasi penelitian disajikan dalam bentuk catatan hasil wawancara, catatan observasi lapangan dan catatan dokumentasi kemudian disusun agar memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi sesuai dengan fenomena dan apa yang harus dilakukan oleh peneliti serta agar peneliti dapat melakukan analisis dengan cepat dan mudah. Data yang didapatkan dalam penelitian ini berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar yang mengetahui manajemen bencana yang dilakukan dalam menangani bencana banjir di Kabupaten Kampar dan wawancara dengan masyarakat Kabupaten Kampar. Yang didokumentasi mengenai

manajemen bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar dalam menangani bencana banjir di Kabupaten Kampar kemudian disajikan dalam bentuk tulisan berdasarkan hasil informasi yang didapat.

Tahap akhir dari model interaktif adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan. Tahap ini dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah ditampilkan. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti menarik kesimpulan yang didukung dengan hasil dari pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Kesimpulan yang ditarik adalah jawaban dari rumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti di awal dan jawaban dari pertanyaan pertanyaan mengenai manajemen bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar dalam menangani bencana banjir. Kemudian kesimpulan yang ditarik oleh peneliti melalui proses verifikasi agar kesimpulan yang ditarik benar-benar merupakan kesimpulan final.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Manajemen Bencana Banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar

4.1.1 Prabencana

Prabencana adalah tahapan yang dilalui sebelum ada terjadinya bencana. Proses penyelenggaraan pengelolaan bencana/manajemen bencana, tahap prabencana dibagi menjadi 2 kondisi yakni kondisi situasi tidak ada bencana dan situasi terdapat potensi bencana. Berdasarkan teori yang peneliti gunakan untuk penelitian ini terdapat beberapa indikator berupa tindakan dari setiap tahap manajemen bencana yakni dalam kondisi situasi tidak ada bencana maka tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan manajemen bencana berupa perencanaan, pencegahan, pengurangan risiko, pendidikan, penelitian, penataan tata ruang. Dan pada saat kondisi situasi terdapat potensi bencana maka

tindakan yang dilakukan berupa mitigasi, peringatan dini, dan kesiapsiagaan.

BPBD Kabupaten Kampar telah memiliki beberapa rencana kedepan dalam penanggulangan bencana di tahap prabencana, rencana tersebut sebenarnya disusun untuk menghadapi seluruh bencana yang kemungkinan akan terjadi, akan tetapi bencana yang rutin terjadi di Kabupaten Kampar hanya banjir, longsor, kebakaran hutan dan lahan serta angin puting beliung. Karena dilingkungan wilayah Kabupaten Kampar terdapat beberapa sungai serta aliran-alirannya oleh karena itu BPBD Kabupaten Kampar membuat peta rawan bencana banjir agar dalam penyusunan rencana manajemen bencana banjir dapat disesuaikan dengan kondisi geografisnya.

Manajemen bencana banjir yang dilakukan BPBD Kabupaten Kampar pada saat sebelum terjadi bencana, BPBD Kabupaten Kampar rutin melakukan patroli untuk memantau kemungkinan terjadi bencana. Kemudian BPBD Kabupaten Kampar melaksanakan tindakan sosialisasi pencegahan bencana, sosialisasi ini mengenai mitigasi dan pencegahan yang dilakukan oleh bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan (PK) yang biasanya dilakukan 2x dalam sebulan di desa rawan bencana banjir. Selain itu dalam melaksanakan mitigasi bencana banjir BPBD Kabupaten Kampar melaksanakan penyebaran leaflet atau brosur seputar banjir dan siaga banjir serta karhutla sebagai bentuk peringatan akan kejadian bencana dan bentuk kesiapsiagaan, tindakan penyebaran informasi seputar banjir ini tidak hanya melalui leaflet, akan tetapi juga melalui siaran radio Suara Kampar yang biasanya dilakukan pada awal tahun serta menyebarkan informasi melalui media sosial yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Kampar. Kemudian melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan/desa, koordinasi yang dilakukan berupa meminta pihak kecamatan untuk mengundang desa-desa yang ada lalu melaksanakan sosialisasi pencegahan bencana banjir kepada desa yang akan terkena dampak bencana banjir.

Manajemen bencana banjir yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Kampar belum ada tindakan pencegahan yang sifatnya membangun dan saat ini fokus manajemen bencana banjir di tahapan prabencana yang dilakukan pada sosialisasi, patroli, serta melatih dan membentuk desa tangguh bencana (Destana).

4.1.2 Saat Tanggap Darurat

Berdasarkan Perka BNPB No.10 Tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat Bencana, saat tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta, benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Menurut *Sukma* dalam *Adiyoso* (2018:93) tahapan tanggap darurat memiliki beberapa indikator tindakan seperti kajian cepat, status keadaan darurat, penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, serta pemulihan.

Tindakan BPBD Kabupaten Kampar pada saat bencana terjadi sebelumnya didasarkan pada kajian cepat yang telah dilakukan, karena kajian cepat tersebut merupakan dasar dari pelaksanaan tindakan manajemen bencananya. Apabila berdasarkan kajian cepat yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Kampar masih berada di status waspada, maka menurut BPBD Kabupaten Kampar dalam mendirikan tenda pengungsi, dapur lapangan, dan sebagainya belum sangat diperlukan, namun apabila berdasarkan kajian cepat dan ternyata status keadaan bencana sudah di siaga, maka tenda pengungsi, dapur lapangan, dan sebagainya harus segera didirikan dan masyarakat harus segera di evakuasi.

Setelah kaji cepat, kemudian BPBD Kabupaten Kampar melakukan pendataan di TKP, selanjutnya melaporkan hasil dari kaji cepat dan pendataan tersebut kepada Kepala Pelaksana dan Kepala Badan (Sekda) mengenai situasi di TKP. Tindakan selanjutnya dari BPBD Kabupaten Kampar adalah hasil kaji cepat di TKP jika ternyata TKP dalam kondisi status siaga banjir maka BPBD Kabupaten Kampar akan melakukan evakuasi, membuat tenda pengungsi, serta

dapur lapangan. Selain itu BPBD Kabupaten Kampar juga menjaga masyarakat baik dari segi pemenuhan kebutuhan dasar serta psikologis masyarakat untuk terhindar dari traumatis, takut, dan sebagainya selama bencana terjadi. Kemudian BPBD Kabupaten Kampar juga membangun kembali akses darurat yang sekiranya diperlukan.

Pelaksanaan manajemen bencana di tahapan saat terjadi bencana ini diperlukan tenaga yang ekstra serta anggaran yang tidak sedikit karena pada saat bencana banjir terjadi, kebutuhan dasar masyarakat menjadi minim akibat dari barang-barang masyarakat yang tenggelam seperti makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya. Oleh karena itu, BPBD Kabupaten Kampar pada tahap ini diminta untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat tersebut. Akan tetapi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam segala aspek memerlukan anggaran yang tidak sedikit, ini yang menjadi kendala bagi BPBD Kabupaten Kampar saat melaksanakan manajemen bencana di tahap saat tanggap darurat / saat terjadi bencana.

4.1.3 Pascabencana

Pelaksanaan manajemen bencana pada tahap ini adalah ketika bencana sudah berakhir dan sedang dalam proses kembali normal. Menurut *Adiyoso* (2018:95) tahap pascabencana merupakan strategi untuk mengembalikan kondisi seperti sebelum terjadinya bencana. Oleh karena itu, strategi pascabencana disebut juga tahapan perbaikan (*Recovery*) yang merupakan proses yang membantu masyarakat untuk kembali ke fungsi kehidupan seperti sebelumnya. Berdasarkan teori yang peneliti gunakan, pada tahap pascabencana terdapat dua indikator tindakan yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi, kedua indikator tindakan itu dilakukan dalam segi prasarana dan sarana, sosial, ekonomi, kesehatan, keamanan dan ketertiban, serta lingkungan.

Manajemen bencana banjir pada tahap prabencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Kampar yaitu melakukan pendataan fisik oleh Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Kampar, untuk kemudian diusulkan anggaran pekerjaan fisik seperti memperbaiki rumah, jembatan, fasilitas umum, dan sebagainya. Setelah itu melaporkan kepada Kepala BPBD (Sekda) dan Bupati tentang dampak dari bencana banjir.

Rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Kampar hanya berfokus pada prasarana dan sarana dan tidak memperhatikan di sektor lainnya seperti ekonomi, sosial, dan lainnya. Selain itu tidak banyak tindakan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Kampar di tahapan pascabencana karena terdapat faktor-faktor penghambat khususnya anggaran, dalam melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Saat ini hanya mendata dan merehabilitasi rekonstruksi yang hanya dapat dikerjakan sesuai dengan kemampuan dan anggaran BPBD Kabupaten Kampar namun

BPBD Kabupaten Kampar akan dapat melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi secara maksimal apabila anggaran tersedia.

4.2 Faktor Penghambat Manajemen Bencana Banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar

1. Kemampuan Sumber Daya Manusia

Kemampuan sumber daya manusia yang dimaksud disini adalah kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing individu di BPBD Kabupaten Kampar. Kemampuan yang dimiliki oleh pekerja di BPBD Kabupaten Kampar tidak sesuai dengan kualifikasi dan tidak sesuai dengan kemampuan yang diperlukan di BPBD Kabupaten Kampar. Sehingga saat ini beberapa sumber daya manusia yang ada BPBD Kabupaten Kampar tidak sesuai dengan bidang dan organisasinya.

Sumber daya manusia dalam melaksanakan manajemen bencana sangatlah penting karena SDM merupakan penggerak atau yang melaksanakan tindakan-tindakan dalam proses manajemen bencana tersebut, apabila tidak memiliki SDM bagaimana bisa manajemen bencana dilaksanakan. Begitu pula dengan kemampuan SDM nya, BPBD Kabupaten Kampar mempunyai kualifikasi yang mumpuni di segi fisiknya begitu juga mentalnya agar manajemen bencana yang dilaksanakan lebih maksimal dan lebih efektif. Tugas dan fungsi BPBD sangat berat bahkan menyangkut nyawa masyarakat, oleh karena itu diperlukan sumber daya manusia yang mumpuni dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut.

2. Masyarakat

Manajemen bencana banjir yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Kampar terhambat oleh salah satu faktor yaitu masyarakat. Maksud dari masyarakat menjadi faktor penghambat disini meliputi partisipasi dan kebiasaan masyarakat Kabupaten Kampar.

Partisipasi masyarakat ini mengenai ikut serta masyarakat dalam tindakan-tindakan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Kampar. Karena pada dasarnya dalam penanggulangan bencana harus ada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Berdasarkan yang peneliti temukan, partisipasi masyarakat pada saat BPBD Kabupaten Kampar melaksanakan tindakan-tindakan manajemen bencana masih kurang, masyarakat tidak antusias dengan apa yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Kampar sehingga masih ada masyarakat yang tidak mengetahui dalam hal manajemen bencana dan bahkan belum mengetahui apa itu BPBD.

Kemudian kebiasaan masyarakat yang dimaksud sebagai faktor penghambat manajemen bencana adalah kebiasaan masyarakat yang tidak mau berubah dan pasrah akan kejadian bencana. Kebiasaan sederhana yang belum bisa dirubah oleh seluruh masyarakat seperti tindakan untuk tidak membuang sampah sembarangan dan diperlukan adanya sikap dari masyarakat yang mau

merubah dan mencegah kejadian bencana banjir terjadi lagi di Kabupaten Kampar. Seperti yang peneliti sampaikan sebelumnya bahwa dalam penanggulangan bencana pihak yang bergerak itu tidak hanya pemerintah, swasta, ataupun masyarakat, akan tetapi ketiga pihak tersebut harus bersinergi untuk melaksanakan manajemen bencana.

3. Anggaran

Anggaran menjadi salah satu faktor penghambat karena BPBD Kabupaten Kampar tidak memiliki anggaran yang cukup dalam melaksanakan manajemen bencana banjir di Kabupaten Kampar. Menurut BNPB, anggaran kebencanaan paling tidak 1% dari APBD yang ada, akan tetapi menurut BPBD Kabupaten Kampar anggaran yang diberikan belum mencapai angka 1%. Menurut BPBD Kabupaten Kampar pemerintah belum memandang manajemen bencana secara penting karena merasa bencana itu tidak setiap hari terjadinya dan hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu, akan tetapi pada saat bencana terjadi pemerintah dan masyarakat baru mencari BPBD dan meminta bantuan serta menyalahkan BPBD Kabupaten Kampar karena dirasa tidak mampu mencegah dan mengurangi risiko kejadian bencana.

Anggaran BPBD Kabupaten Kampar saat ini difokuskan untuk mengatasi seluruh bencana oleh karena itu saat ini BPBD Kabupaten Kampar belum bisa mengatasi bencana secara efektif karena masih banyak kekurangan prasarana dan sarana yang dibutuhkan.

4. Struktur Organisasi yang Tidak Menjalankan Tugas dan Fungsinya

Salah satu yang menghambat manajemen bencana banjir yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Kampar adalah permasalahan didalam organisasi tersebut. Permasalahan yang dimaksud adalah bidang-bidang didalam BPBD Kabupaten Kampar yang tidak menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana seharusnya.

Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan manajemen bencana yang masih terfokus pada satgas PUSDALOPS yang berada dibawah bidang kedaruratan dan logistik.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dalam pelaksanaan manajemen bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar jika dinilai dari teori yang peneliti gunakan yakni dilihat dari tindakan di tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana maka pelaksanaan manajemen bencana yang dilakukan sudah cukup baik hanya saja belum maksimal, hal ini bisa dilihat dari tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar dalam setiap tahapannya.

Dari ketiga tahapan dalam pelaksanaan manajemen bencana, berdasarkan tindakan yang dilakukan pada tahapan prabencana dan pascabencana menjadi tahapan yang paling belum maksimal dilakukan oleh BPBD Kabupaten Kampar. Pada tahap prabencana tindakan yang dilakukan belum maksimal karena tindakan prabencana yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Kampar hanya berfokus pada sosialisasi mitigasi bencana, penyebaran informasi dan teknis lainnya, tidak ada tindakan pencegahan secara spesifik yang ditujukan untuk mencegah terjadinya banjir agar tidak terulang lagi seperti tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahap saat tanggap darurat BPBD Kabupaten Kampar telah melaksanakan manajemen bencana dengan baik akan tetapi belum maksimal karena tindakan-tindakan seperti kaji cepat, evakuasi dan penyelamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta melindungi masyarakat telah dilakukan agar keselamatan masyarakat dapat terjamin. Kemudian dalam tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi manajemen bencana yang dilakukan belum maksimal karena tindakan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Kampar hanya berfokus pada

prasarana dan sarana dan tidak memperhatikan sektor lainnya seperti ekonomi, sosial, kesehatan, dan lain-lain.

Adapun faktor penghambat bagi BPBD Kabupaten Kampar dalam melaksanakan manajemen bencana banjir di Kabupaten Kampar yaitu; (1) Kemampuan sumber daya manusia; (2) Masyarakat; (3) Anggaran; (4) Struktur organisasi yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya. Faktor penghambat tersebut harus dapat segera dapat diatasi agar manajemen bencana banjir menjadi lebih efektif karena pada dasarnya manajemen bencana bertujuan untuk mencegah dan mengurangi dampak bencana. Bencana memang tidak mungkin untuk dihindari, akan tetapi bencana dapat dicegah dan dikurangi risikonya.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan Manajemen Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar dalam Menangani Bencana Banjir, peneliti memberikan sedikit saran sebagai berikut:

1. Pemerintah, swasta, dan masyarakat harus dapat bekerjasama dalam melaksanakan manajemen bencana banjir karena manajemen bencana bukan hanya pemerintah yang harus bertindak akan tetapi seluruh pihak juga harus terlibat sesuai dengan logo dari BNPB yakni segitiga biru yang artinya sinergi antara 3 pihak yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat dalam manajemen bencana.
2. BPBD Kabupaten Kampar menyusun kembali tata kerja organisasi khususnya di tahapan prabencana dan pascabencana sehingga manajemen bencana yang dilakukan tidak hanya berfokus pada satu aspek.
3. Pihak-pihak seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan sebagainya yang memiliki tugas dan fungsi terkait kebencanaan harus dapat

bekerjasama dan berkordinasi dalam melaksanakan manajemen bencana karena pada saat ini manajemen bencana yang dilakukan berdasarkan kepentingan masing-masing.

4. BPBD Kabupaten Kampar dalam melaksanakan tugasnya harus selalu berkomunikasi, bekerjasama, dan berkordinasi antar sesama bidangnya agar dalam melaksanakan tindakan manajemen bencana menjadi lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adiyoso, Wignyo. 2018. *Manajemen Bencana Pengantar & Isu-Isu Strategis*. Jakarta: Bumi Aksara
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT.Rineka Cipta
- Bungin, Burhan. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Carter, Nick W. 2008. *Disaster Management: A Disaster Manager's Handbook*. Mandaluyong: Asian Development Bank
- Creswell, W. J. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, ed. ke-3. Terjemahan: Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Gunawan, Restu. 2010. *Gagalnya Sistem Kanal Pengendalian Banjir Jakarta dari Masa ke Masa*. Jakarta: Kompas
- Herdiansyah, Haris. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga
- Kodoatie, J.R dan Sjarief, R. 2006. *Pengelolaan Bencana Terpadu*. Jakarta: Yarsif Watampone
- Musfah,Jejen. 2015. *Manajemen Pendidikan Teori, Kebijakan, dan Praktik*. Jakarta: Kencana

- Priambodo, A.S. 2009. *Paduan Praktis Menghadapi Bencana*. Yogyakarta. Kanisius
- Raco, J. R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT.Grasindo
- Ramli, Soehatman. 2010. *Manajemen Bencana*. Jakarta: Dian Rakyat
- Rijanta, R. Hizbaron, D.R, Baiquni, M. 2018. *Modal Sosial Dalam Manajemen Bencana*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Siyoto, Sandu dan Sodik, Ali. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing
- Sule, T. E dan Saefullah, K. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana
- Torang, Syamsir. 2013. *Organisasi & Manajemen: Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi*. Bandung: Alfabeta
- Jurnal:**
- Afni, Yul. 2018. *Analisa Kesiapsiagaan Masyarakat Pauh Dalam Menghadapi Permasalahan Kesehatan Pasca Bencana Banjir Bandang: Perspektif Penerapan Manajemen Bencana*. Jurnal Akper Kesdam Vol. XII, No.7 Juli Hal. 120-128
- Fedryansyah, Muhammad. Ramadhan Pancasilawan, Ishartono. 2018. *Penanggulangan Bencana di Masyarakat Desa Studi di Desa Cipacing, Desa Cileles, dan Desa Cikuruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang*. Jurnal Pekerjaan Sosial Vol.8, No.1 Hal. 11-16 ISSN 2339-0042 (p) ISSN 2528-1577 (e)
- Mardikaningsih, Muliana Sri. Chatarina Muryani, Setya Nugraha. 2017. *Studi Kerentanan Dan Arah* *Mitigasi Bencana Banjir Di Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2016*. Jurnal GeoEco Vol.3, No. 2 Juli Hal. 157-163
- Wahyudi, Muh. Ruskin Azikin, Samsir Rahim. 2019. *Manajemen Penanggulangan Banjir di Kelurahan Paccerakkang Kota Makassar*. Jurnal Administrasi Publik Vol. 5, No. 1 April Hal. 31-45
- Wulansari, Diah. Darumurti, Awang. Eldo, Padma Akta Hartomi Dwian. 2017. *Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Manajemen Bencana*. Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik Vol.4, No. 3 Oktober Hlm 407-421
- Dokumen:**
- Indeks Risiko Bencana & Membangun Kab/Kota Tangguh oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana Alam
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar
- Rekapitulasi Bencana Banjir, Longsor, dan Angin Puting Beliung di Provinsi Riau Tahun 2017, 2018, 2019
- Rekapitulasi Bencana Banjir, Longsor, dan Angin Puting Beliung di Kabupaten Kampar Tahun 2017, 2018, 2019
- Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Kampar Tahun 2017-2022
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
- Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kampar